

MAKALAH

**ANTARA DEMOKRASI, OTONOMI DAERAH
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

(Paper Kritis Menelusuri Implementasi Demokrasi di Indonesia Dalam Kaitannya
Dengan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Paradigma Pembangunan Sosial)



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

oleh

Delmira Syafrini. S.Sos, M.A
Staff Pengajar Jurusan Sosiologi FIS UNP

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
TERIMA TGL.	: 19-10-2011
SUMBER/FAKSA	: Hd /
KOLEKSI	: K1
NO. INVENTARIS	: 308 (Hd/2011-a.1 (1))
KLASIFIKASI	: 305.5 Sya a.1

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya selaku dosen pembina di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UNP menyatakan bahwa:

Nama : Delmira Syafrini, S.Sos., M.A.
Nip : 198305182009122004
Jabatan : Staff Pengajar di Jurusan Sosiologi FIS UNP

telah menyusun makalah yang berjudul **“Antara Demokrasi, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat”**

Saya merekomendasikan bahwa makalah tersebut telah memenuhi kaidah penulisan sebuah karya ilmiah.

Mengetahui,
Dosen Pembina



Prof. Dr. Mestika Zed. M.A

Nip.195509191982031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi, masih saja menjadi wacana yang menarik untuk dikaji sampai saat ini, karena terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan yang ia hadirkan, demokrasi tetap menjadi bentuk ideal dari sistem pemerintahan yang ingin diwujudkan oleh banyak negara di belahan dunia. Demokrasi yang pada prinsipnya merupakan pemerintahan oleh rakyat seolah memberikan “angin segar” bagi seluruh rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh sistem otoriterian, karena relevansi demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyat sepenuhnya untuk bertindak dan menghormati hak dasar manusia. Prinsip ini jelas bertentangan dengan sistem pemerintahan otoriterian yang cenderung diktator dan mengekang bahkan membuat rakyat terpasung dengan segala kepentingan penguasa.

Perubahan sistem pemerintahan menuju pemerintahan demokrasi di beberapa negara berkembang cenderung diawali dengan adanya gejolak politik sebagai aksi ketidakpuasan pada pemimpin atau rezim yang berkuasa. Ketika rakyat merasakan pasungan yang begitu kuat terhadap hak-hak mereka ataupun krisis ekonomi yang berkepanjangan akibat pembangunan yang tidak pro-rakyat, maka pada puncaknya akan melahirkan gerakan massa yang menuntut reformasi disegala bidang yang pada akhirnya bermuara pada runtuhnya rezim otoriterian dan digantikan dengan sistem yang dirasakan lebih adil bagi seluruh rakyat yaitu sistem demokrasi.

Di Indonesia dimulainya demokratisasi terlihat jelas setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 sebagai diktator dan pemimpin rezim otoriter Orde Baru. Dimana salah satu penyebab runtuhnya rezim ini yang menjadi pelajaran berharga sampai saat ini adalah sistem pembangunan yang bersifat sentralistik dengan paradigma pembangunan lebih ditekankan pada sektor ekonomi. Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah cenderung mengabaikan pembangunan dibidang lain, seperti pembangunan sumber daya manusia sebagai modal penting penggerak pembangunan. Pemerintah terlalu terfokus untuk peningkatan perekonomian negara setinggi tingginya

dan cenderung diiringi dengan eksploitasi sumber daya alam di daerah, yang menyebabkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, bahkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Penguasa bekerja bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi berusaha untuk mensejahterakan keluarga mereka dengan menggunakan harta negara. Pada masa ini paradigma pembangunan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesejahteraan dan kedaulatan rakyat, bukan kesejahteraan negara dan penguasa. Hal inilah yang memancing lahirnya reformasi di Indonesia yang menuntut perubahan tatanan masyarakat di segala bidang kehidupan, tidak saja pada ranah politik tapi juga ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan termasuk juga pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu produk terpenting dari reformasi politik yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi adalah dicanangkannya otonomi daerah yang secara prosedural dan substansial bertujuan untuk pengukuhan kembali kedaulatan rakyat (demokratisasi) setelah sekian lama terkubur akibat menguatnya cengkaman negara pada masa Orde Baru. Otonomi daerah dan pembangunan desentralisasi direalisasikan sebagai perwujudan hak dan kewajiban masyarakat untuk pengembangan dirinya menjadi masyarakat yang mandiri dan terbuka sebagai manifestasi pembangunan pada pemerintahan yang demokratis. Artinya agenda pembangunan pada masa otonomi daerah harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Ketika Indonesia sebagai negara demokrasi adalah negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, dan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang juga pro-kesejahteraan rakyat, maka sudah seharusnya dengan adanya otonomi daerah, masing-masing pemerintahan di tingkat pusat, daerah dan bekerjasama dengan rakyat mewujudkan cita-cita tersebut. Sehingga agenda reformasi menuju negara yang demokratis dan pro pada kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan.

Namun perdebatan seputar demokrasi dan otonomi daerah sampai saat ini masih menjadi persoalan yang patut untuk dikaji, karena banyak pengamatan yang menunjukkan bahwa laju proses demokrasi tidak selinier yang dibayangkan. Begitu juga

halnya jargon “reformasi total” dan otonomi daerah belum menunjukkan implikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Masih banyak nada-nada pesimis yang muncul terhadap kesuksesan demokrasi dan otonomi daerah dalam menjawab masalah kesejahteraan. Apakah demokrasi benar-benar mampu untuk menjawab cita-cita kesejahteraan atau justru sebagai penghalang. Mana yang harus didahulukan oleh suatu negara untuk menjawab kepentingan rakyat, negara yang demokrasi ataukah kesejahteraan? Maka tulisan ini akan menjawab bahwa antara demokrasi dan kesejahteraan bisa diwujudkan secara beriringan tanpa harus ada yang dikesampingkan..

1.2. Permasalahan (Fokus Pembahasan)

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dan fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Implikasi demokrasi yang ada di Indonesia dengan bercermin pada sejarah dan hakekat munculnya demokrasi? Dan bagaimana seharusnya demokrasi diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan paradigma pembangunan yang seharusnya pro kesejahteraan rakyat dengan adanya otonomi daerah, dalam rangka mewujudkan tuntutan agenda reformasi dan cita-cita negara demokrasi.

1.3. Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk memahami secara detail bagaimana sesungguhnya hakekat demokrasi dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial, dengan melihat sejarah demokrasi dunia sekaligus implikasinya di Indonesia. Bagaimana seharusnya demokrasi diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan paradigma pembangunan yang seharusnya pro kesejahteraan rakyat dengan adanya otonomi daerah, yang kemudian permasalahan yang ada dianalisa dengan teori-teori Sosiologi yang relevan, sehingga mempertajam pisau analisa penulis dalam memahami fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat secara umum.

BAB II

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari sejarah dan hakekat munculnya demokrasi itu sendiri. Untuk itu sebelum melihat lebih jauh kaitan antara demokrasi dengan kesejahteraan sosial di Indonesia pada masa otonomi daerah, maka harus dikaji terlebih dahulu bagaimana sejarah demokrasi itu muncul dan berkembang dan bagaimana hakekat kesejahteraan sosial yang terkandung dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pada bagian ini akan dipaparkan sejarah munculnya demokrasi dunia, kaitan antara demokrasi dan kesejahteraan dan kemudian di relevansikan pada implementasi demokrasi di Indonesia dalam kaitannya dengan paradigma pembangunan masa otonomi daerah menuju terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat sebagai cita-cita demokrasi dan tujuan otonomi daerah itu sendiri.

2.1. Demokrasi Dalam Sejarah dan Realitas (Menjelajahi Jatuh Bangunnya Demokrasi Dalam Sejarah Dunia)

Perjalanan Demokrasi telah memiliki sejarah yang cukup panjang dalam dekade kehidupan manusia. Demokrasi bukanlah wacana yang baru saja muncul, diperdebatkan dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara, tapi justru ia telah diciptakan sejak lama, dan secara alami ketika kehidupan manusia masih dalam tatanan masyarakat yang sangat “primitif” dimana kehidupan manusia masih ditandai dengan pola hidup nomaden. Kehidupan yang begitu alami yang berada dalam lingkup “logika persamaan” dimana pembagian kerja begitu jelas tanpa ada pemaksaan, dan masing-masing anggota dalam kelompok kecil berhak ikut serta dalam tiap pengambilan keputusan. Selama beribu tahun, bentuk demokrasi primitif mungkin telah menjadi sistem politik yang paling “alami”.

Dalam tatanan sejarah istilah demokrasi mulai dikenal pada abad 500 SM di Yunani dan Romawi. Di Yunani masyarakat hidup dalam sistem pemerintahan yang disebut negara “*Polis*”(negara kota) salah satunya yang terkenal adalah apa yang

dinamakan dengan polis Athena. Athena menganut sistem kerakyatan selama dua abad lamanya, disini untuk pertama kalinya adanya demokrasi partisipatif dimana partisipasi warga negara sangat terlihat jelas dalam sistem pemerintahan. Istilah demokrasi untuk pertama kali juga dikenalkan di Yunani pada abad 5 M. Herodotus memperkenalkan istilah demokrasi dari kata-kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan), dimana *demos* adalah bahasa Athena yang merujuk pada seluruh rakyat Athena bahkan rakyat biasa. Namun pada akhirnya setelah tahun 321 SM, Athena ditakhlukkan oleh Macedonia selama beberapa generasi yang kemudian jatuh ketangan Romawi.(Dahl, 2001:14). Hampir sama dengan waktunya, dengan Yunani, demokrasi juga muncul di Romawi, akan tetapi Romawi menamakan sistem mereka dengan Republik. *Res* (kejadian), dan *publicus* (publik). Jadi Republik adalah sesuatu yang menjadi milik rakyat. Pemikiran para filsuf Romawi juga telah berkembang, Plato dan Socrates membela hak manusia untuk mengkritisi pemerintahnya. Bahkan Cicero sang orator Romawi menyatakan “Tidak ada negara kecuali dimana rakyatnya memiliki kekuasaan tertinggi yang memberikan ruang bagi kebebasan”(Ketchum, 2004:32)

Dari sejarah lahirnya demokrasi di dua negara peradaban tersebut, bisa dikatakan bahwa demokrasi terlahir untuk memenuhi kehendak rakyat dimana sudah seharusnya rakyat memegang kekuasaan tertinggi dengan adanya kebebasan untuk mendapatkan hak dasar mereka sebagai manusia. Namun, pada perkembangan selanjutnya ketika polis Athena runtuh akibat kekalahan dengan polis Sparta yang lebih bersifat totalitarian, kritikan yang tajam pun menghujam demokrasi pada masa itu, bahkan Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi hanyalah pemerintahan yang ditujukan untuk kebaikan kaum miskin, dimana kekalahan Athena dinilai Plato sebagai kemerosotan kota dan pembusukan moralitas dan kepemimpinan. Rakyat yang terlalu diberi kebebasan hanya akan menimbulkan anarki (tiada otoritas politik) dan kekacauan yang memberikan jalan bagi tirani(pemerintahan yang diktator).(Sorensen, 2003: 3).

Pasca runtuhnya polis Athena, perbincangan mengenai demokrasi terhenti dalam kurun waktu yang sangat lama, sampai kembali bergulir ketika dicetuskannya *magna charta* di Inggris pada abad pertengahan untuk membatasi kekuasaan raja yang

merupakan akar lahirnya demokrasi dan lahirnya Undang-Undang Dasar. Dan di Perancis pasca Revolusi Perancis melahirkan “Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga negara” yang mengantarkan Prancis menjadi Republik, lepas dari kediktatoran Louis ke XVI (Ketchum, 2004:34). Namun dengan adanya deklarasi tersebut ternyata otoriterian tidak bisa begitu saja dihentikan dan digantikan dengan sistem demokrasi yang didambakan, kediktatoran tetap mewarnai sejarah dunia pada abad ke-20, sejarah diwarnai oleh rezim berdarah dunia, dimana kediktatoran menjadi sesuatu yang diagungkan. Darwinisme Sosial dengan “*The Survival of The Fittest*” menjadi tolak ukur kekuasaan, sehingga melahirkan pemimpin kejam, sehingga Fasisme menjadi merebak di beberapa negara, sebut saja : di Jerman: Adolf Hitler, Uni Soviet: Joseph Stalin, Italia: Benito Mussolini, yang membuat rakyat berada pada pihak yang selalu dirugikan. Namun setelah berakhirnya perang dunia ke dua yang ditandai dengan kekalahan beberapa negara fasis, demokrasi kembali marak diperbincangkan, karena pada masa ini kekalahan negara fasis memberikan kemenangan dan kemerdekaan pada beberapa negara Asia-Afrika yang selama ini terkungkung dalam belenggu kolonialisme..Kekalahan negara fasis menandai kemenangan awal bagi iklim demokrasi di dunia sampai saat ini.

2.2. Menyibak Konsep Kesejahteraan dibalik Cita-cita Demokrasi

Pada pembahasan diatas bisa di saksikan bagaimana perjalanan demokrasi dalam sejarah dunia. Betapa sering demokrasi jatuh bangun pada abad dan tempat yang berbeda, namun pada abad ke-21 ini harapan untuk menyemai kembali demokrasi kembali muncul. Banyak pakar sepakat dibalik kelemahan dan kelebihanannya, demokrasi tetap menjadi sebagai sebuah sistem pemerintahan ideal yang harus diwujudkan. Karena hakekatnya sebuah negara harus tetap memikirkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat sebagai tolak ukur utama kekokohan sebuah negara, bukan hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan penguasa semata. Jadi bagaimanapun adanya demokrasi, ia tetap menjadi cara yang lebih baik untuk memerintah suatu negara.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apa kaitan demokrasi dengan kesejahteraan sosial dan kenapa demokrasi dipandang sebagai cara yang lebih baik untuk memerintah suatu negara? Robert Dahl(2001:63) menjawab hal ini dengan beberapa premisnya. Dahl menyatakan setidaknya demokrasi unggul dalam beberapa hal, diantaranya: demokrasi menjamin sejumlah hak asasi dan kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya yang membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok dibanding negara yang non demokratis, dan yang tidak kalah penting negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung lebih makmur dari pada negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Apa yang dinyatakan Dahl tentu bukan spekulasi semata, tetapi berdasar kan perbandingan dengan negara otoriterian yang mengekang kepentingan individu demi kepentingan “licik” para penguasa yang diktator. Karena kesejahteraan bukan hanya diukur sebatas “merdeka” dan bebas secara materi, tapi lebih dari itu hakekat kesejahteraan merujuk pada “kemerdekaan” dan kebebasan disegala bidang, termasuk bebas menyuarakan ide dan menikmati hasil pembangunan sebagai tolak ukur awal terciptanya kesejahteraan.

Apa yang diungkapkan Dahl juga didukung pendapat Amartya Kumar Sen, (1999, 34) peraih Nobel ekonomi 1998, secara tegas Sen mengungkapkan bahwa di negara demokatislah iklim kesejahteraan bisa berkembang secara utuh, karena kebebasan sebagai modal utama kesejahteraan dalam pembangunan lebih diakui, dan kesuksesan pembangunan disuatu negara terletak pada “kebebasan” yang diberikan kepada rakyat untuk menikmati hasil pembangunan. Sementara di negara otoriter, satu-satunya jalan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dan membangun negara yang kuat setara dengan negara maju adalah dengan cara mencapai pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi dengan kekuasaan penuh tanpa memperhitungkan kepentingan rakyat, bahkan cenderung memasung kepentingan rakyat. Tolak ukur kesejahteraan bagi mereka adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan suksesnya pembangunan berbasis ekonomi, dengan melupakan pertumbuhan pembangunan sosial seperti pemberdayaan masyarakat, pelayanan sosial dan kebebasan individu yang juga merupakan aspek terpenting dari kesuksesan pembangunan sebuah negara. (Wie, 2004; 9).

Apa yang diungkapkan Dahl dan Sen, kalau dihayati lebih jauh lagi sangat sesuai dengan hakekat demokrasi sesungguhnya. Hakekat demokrasi pada dasarnya adalah memberikan ruang sepenuhnya kepada rakyat untuk menikmati kebebasan dalam melakukan setiap tindakan, begitu juga dalam hal menikmati hasil pembangunan, selayaknya rakyat juga menikmati kesejahteraan seiring dengan kesejahteraan yang dicapai suatu negara karena kesuksesan pembangunan. Dengan demikian sudah seharusnya negara demokrasi hari ini, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Sehingga implikasi pembangunan sejalan dengan slogan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya antara konsep demokrasi dan kesejahteraan adalah dua hal yang bisa saling menopang. Kalaupun pada banyak negara berkembang yang telah menerapkan demokrasi tetap belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang harus dipersalahkan bukanlah demokrasinya, tapi bisa saja perlu pembenahan yang lebih serius lagi dalam berbagai hal, baik tata cara pelaksanaan demokrasi ataupun paradigma pembangunan yang belum menyentuh kepentingan rakyat kecil.

2.3. Implementasi Demokrasi di Indonesia: Menuju Pembangunan Berorientasi Kesejahteraan Rakyat Pada Masa Otonomi Daerah

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, tidak terlepas dari periodisasi sejarah politik yang pernah ada. Komitmen demokrasi sebenarnya telah terbentuk semenjak awal periode kemerdekaan oleh para “founding father”, dimana begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara memiliki hak-hak politik yang sama. Namun, demokratisasi yang menyeluruh mulai diterapkan secara serius pasca runtuhnya rezim Soeharto tahun 1998 yang mengawali reformasi total dalam seluruh bidang kehidupan rakyat Indonesia. Sejak periode awal konsep demokrasi yang dicanangkan di Indonesia sesungguhnya sudah mencerminkan konsep demokrasi yang ideal yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum dalam sila-sila Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” sebagai landasan demokrasi dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan lambang padi dan kapas sebagai landasan dan cita-cita kesejahteraan sosial. Namun selama ini pada implikasinya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan yang hingga tahun 2007 telah mencapai 16,5% (BPS:2007)

Pada prinsipnya perwujudan konsep kesejahteraan yang dicita-citakan negara Indonesia sebagai negara demokrasi, tidak terlepas dari paradigma pembangunan yang dianut oleh pemerintah Indonesia, apakah paradigma pembangunan ekonomi semata yang tidak pro-rakyat atau juga diiringi dengan paradigma pembangunan sosial yang berorientasi pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Karena pada dasarnya hakekat pembangunan nasional Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan untuk mengejar keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan batiniah (Lemhamnas, 1997:16). Masyarakat dikatakan sejahtera apabila segala kebutuhan telah dapat terpenuhi. Oleh karena itu pembangunan harus bersifat menyeluruh mencakup semua bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena arah pembangunan yang benar adalah kalau diarahkan untuk mensejahterakan masyarakat disegala bidang kehidupannya (Bolong, 2003:18).

Namun sayangnya, pembangunan di Indonesia selama ini belum memenuhi tuntutan tujuan pembangunan nasional Indonesia akibat paradigma pembangunan yang tidak pro-rakyat dengan sistem sentralisasi yang diterapkan pada masa Orde Baru Pada masa ini kebijakan pembangunan hanya ditekankan pada sektor ekonomi saja tanpa diiringi dengan pembangunan sosial disegala bidang. Sistem pembangunan yang sentralistik pada masa Orde Baru menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial antara pusat dan daerah dimana untuk mencapai hasil pembangunan diiringi dengan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran didaerah. Memang tidak bisa disangkal paradigma pembangunan pada masa ini menunjukkan kemajuan yang mengesankan dengan kemampuannya menekan inflasi sebesar 10 % dan meningkatkan pertumbuhan GNP mencapai 8-9% pertahun dengan pendapatan perkapita US\$ 560 dalam waktu kurang dari 15 tahun (Bolong, 2003: 23). Namun, pertumbuhan pembangunan

perekonomian ini tidak diiringi dengan pertumbuhan pembangunan sosial yang merata bagi seluruh rakyat, sehingga menimbulkan maldevelopment. Maka untuk saat ini otonomi daerah sebagai produk reformasi adalah salah satu jalan keluar yang sangat relevan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia sesungguhnya.

Otonomi daerah adalah salah satu produk terpenting dari reformasi politik yang berlangsung di Indonesia semenjak tahun 1998 yang bermuatan demokratisasi. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, keadilan demokrasi dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, sementara tujuan khusus dari kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan maupun implementasinya sehingga terwujud pemerintahan lokal yang bersifat efisien, transparan dan responsif (Sudja, 2007). Ini artinya dengan adanya otonomi daerah diberikan kesempatan untuk masing-masing daerah di Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri dimana rakyat dilibatkan dalam proses pembangunan yang dilakukan, kreativitas dan potensi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan yang direncanakan. Dimana rakyat bukan hanya sebagai sasaran(objek) pembangunan saja tapi juga sebagai pelaku(subjek) yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Dengan demikian tujuan otonomi daerah sinergis dengan hakekat pembangunan yang dicanangkan pemerintahan Indonesia dan sejalan dengan tujuan dan hakekat demokrasi yaitu sama-sama bermuara pada kesejahteraan rakyat

Pembangunan yang ideal pada hakekatnya bukan hanya pembangunan yang berorientasi pada pembangunan perekonomian semata, guna meningkatkan pendapatan negara setinggi-tingginya. Tapi sudah semestinya pembangunan dinegara demokrasi seperti Indonesia dengan adanya otonomi daerah juga memperhatikan pembangunan sosial yang berorientasi pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Midgley (2005: 168) pembangunan sosial merupakan proses perubahan sosial terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan. Pembangunan dalam hal ini ditujukan pada pengembangan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dilakukan. Pembangunan sosial dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses

pembangunan ekonomi, karena pembangunan sosial tidak akan terjadi tanpa pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak akan bermakna tanpa diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh(Adi, 2002: 118). Artinya kedua pendekatan pembangunan ini saling berhubungan satu sama lain dimana yang satu bersifat fungsional bagi yang lainnya.

Hal ini sejalan dengan analisa teori fungsionalisme struktural, dalam menganalisa fakta sosial, melihat bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan perubahan pada bagian lain. Suatu pranata dapat fungsional bagi suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya disfungsional bagi unit sosial lainnya. Robert K. Merton menyebutkan apa yang dinamakan dengan fungsi laten(yang tidak diharapkan) dan fungsi Manifes (yang diharapkan)(Ritzer, 2004:23). Teori inilah yang bisa dipakai untuk menganalisa fakta dari pembangunan di Indonesia saat ini, ketika Pembangunan sosial tidak dioptimalkan maka, akan berdampak pada pembangunan ekonomi, yang melahirkan fungsi laten (yang tidak diharapkan) yaitu berupa kesenjangan sosial dan kemiskinan. Makanya untuk menyeimbangkan ini diperlukan sinergisitas antara kedua pendekatan tersebut, agar dampak pembangunan bisa menguntungkan untuk semua pihak. Caranya adalah dengan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemabangunan. Alex Inkeles dan David H. Smith dalam teorinya juga menyatakan tentang pentingnya faktor manusia dalam menopang pembangunan. Bukan sekedar perkara pemasokan modal dan teknologi saja. Tapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut agar menjadi produktif (Budiman, 2000:34)

Namun, pendekatan pembangunan sosial dengan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat bukanlah perkara yang mudah, mengingat mental masyarakat Indonesia yang masih bernuansa orde baru, cenderung apatis dan tidak kreatif dalam menata kehidupan, bersikap pasif terhadap pembangunan sehingga menjadikan mereka bukan hanya miskin secara struktural tapi juga miskin secara kultural. Untuk itu agar terwujudnya cita-cita pembangunan nasional dengan basis otonomi daerah, maka

pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah seharusnya mencari alternatif solusi untuk keluar dari masalah ini, karena pemerintah tidak bisa tutup mata bahwa pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat lokal. Maka salah satu solusi yang sangat penting adalah peningkatan pelayanan masyarakat, baik berupa pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan sebagai peletak dasar perubahan pola pikir individu.

Edi Suharto(2006: 5) juga mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pembangunan nasional disuatu negara bangsa (*nation state*) memiliki tiga tugas utama yakni pertumbuhan ekonomi(*economic growth*) perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengarah pada usaha untuk memperoleh pendapatan finansial untuk membiayai pembangunan. Fungsi perawatan menyangkut pelayanan dan perlindungan terhadap keselamatan dan kelangsungan kehidupan warga negara (seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan), sementara fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka penyediaan tenaga kerja berkualitas yang pada dasarnya juga mendukung jalannya pembangunan. Dan untuk mencapai pembangunan nasional yang optimal maka ketiga aspek diatas harus dijalankan secara seimbang karena fungsi perawatan dan pengembangan manusia inilah yang merupakan substansi pembangunan sosial yang menopang pembangunan ekonomi. Berbagai studi memberi pesan yang sangat jelas bahwa negara yang kuat dan sejahtera adalah negara yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memiliki komitmen menjalankan pembangunan sosial. Laporan UNDP Human Development Report secara konsisten menunjukkan bahwa pembangunan sosial mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan sosial tidak akan bertahan lama.

Banyak konsep pembangunan dinegara berkembang dan demokrasi lainnya menemui kegagalan karena memisahkan pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi. Sektor-sektor yang dikelompokkan dalam bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terabaikan dan terkalahkan oleh sektor ekonomi. Padahal terbukti

bahwa pembangunan negara-negara industri baru berhasil karena penekanan yang diberikan pada bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Bahkan Gary Becker pemenang nobel tahun 1992 memelopori apa yang disebutnya sebagai *human capital* (modal manusia), dimana investasi modal manusia berupa pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan ini dari berbagai penelitian ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak kalah penting dari investasi modal fisik (Kartasasmita, 1996:140)

Modal manusia inilah yang saat ini dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan di daerah, karena untuk pengolahan sumber daya alam yang melimpah juga harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah bisa lebih optimal, begitupun untuk menjawab tantangan globalisasi yang semakin gencar saat sekarang ini, yang dibutuhkan bukan hanya kekuatan sektor perekonomian saja, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang potensial, kompetitif dan kritis dalam menyikapi tantangan pembangunan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian jelas sudah, bahwa kesejahteraan sosial sangat mungkin tercipta pada negara demokrasi seperti Indonesia. Apalagi dengan adanya otonomi daerah yang menekankan pada pemerataan pertumbuhan perekonomian di segala bidang kehidupan, dimana daerah diberi wewenang untuk mengolah sumber daya alam sendiri maka potensi sumber daya manusia tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Sudah masanya Indonesia bangkit dari keterpurukan akibat sistem penjajahan dan regulasi yang tidak berpihak rakyat pada masa orde baru. Pemerintah dan rakyat harus sama-sama bangkit untuk menyelesaikan pembangunan. Pemerintah membangun masyarakat dengan peningkatan pelayanan sosial melalui pendidikan dan pelatihannya, sementara rakyat inovatif dalam memanfaatkan setiap peluang untuk kreatif mengolah potensi yang ada tanpa takut bersaing dengan kekuatan luar akibat globalisasi. Sehingga dengan demikian di Indonesia tercipta iklim pembangunan yang dinamis, menguntungkan pertumbuhan perekonomian negara dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional Indonesia dan tujuan dicanangkannya otonomi daerah di Indonesia sebagai negara yang demokratis

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Sejarah demokrasi adalah sejarah revolusi, karena melihat dari sejarah lahirnya demokrasi sebagian negara didunia, selalu saja diawali oleh tuntutan atas sebuah perubahan. Di banyak negara berkembang, kelahiran demokrasi cenderung diawali dengan adanya gejolak politik sebagai aksi ketidakpuasan pada pemimpin atau rezim yang berkuasa yang melahirkan gerakan massa dengan menuntut reformasi disegala bidang, yang pada akhirnya bermuara pada runtuhnya rezim otoriterian dan digantikan dengan sistem yang dirasakan lebih adil bagi seluruh rakyat yaitu sistem demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diharapkan bagi sebagian besar rakyat dibanyak negara, Robert dahl(2001) mengungkapkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan paling ideal pada abad ini, karena sistem ini lebih mendukung kepentingan rakyat dan memenuhi hak dasar kemanusiaan secara penuh sebagai inti dari hakekat demokrasi dalam kaitannya dengan perwujudan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia dimulainya demokratisasi terlihat jelas setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 sebagai diktator dan pemimpin rezim otoriter Orde Baru. Dimana salah satu penyebab runtuhnya rezim ini yang menjadi pelajaran berharga sampai saat ini adalah sistem pembangunan yang bersifat sentralistik dengan paradigma pembangunan lebih ditekankan pada sektor ekonomi. Sehingga untuk mencapai tujuan pembangunan pemerintah cenderung mengabaikan pembangunan dibidang lain, seperti pembangunan sumber daya manusia sebagai modal penting penggerak pembangunan.

Cukuplah pengalaman pahit masa Orde Baru menjadi kenangan lama bagi sejarah peradaban di Indonesia, yang tidak akan terulang sampai kapanpun. Karena pada masa Orde Baru komitmen demokrasi telah diselewengkan dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Banyak harapan kembali tertumpang setelah dicanangkannya otonomi daerah sebagai produk reformasi politik di Indonesia. Otonomi daerah

diharapkan lebih bisa mewujudkan janji kesejahteraan seperti tujuan pembangunan nasional Indonesia, dengan paradigma pembangunan ekonomi bisa diiringi dengan paradigma pembangunan sosial. Sehingga hasil pembangunan juga bisa dinikmati oleh rakyat secara langsung, dimana mereka juga terlibat didalamnya, bukan hanya sebagai objek(sasaran) pembangunan saja, tapi juga sebagai subjek(pelaku) pembangunan, dengan cara memberdayakan rakyat melalui peningkatan pelayanan sosial seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Memang sudah seharusnya paradigma pembangunan Indonesia masa otonomi daerah ini mengikuti tujuan pembangunan Indonesia sesungguhnya, yang tidak hanya berbasis peningkatan perekonomian semata, tetapi juga berpihak pada pembangunan sosial dengan pemberdayaan masyarakat lokal demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian modal manusia yang potensial "*human capital*" sudah merupakan syarat mutlak dalam kesuksesan sebuah pembangunan di suatu negara, termasuk di Indonesia. Seperti apa yang diungkapkan Alex Inkeles dan David H. Smith dalam teorinya bahwa faktor manusia dalam menopang pembangunan adalah syarat yang sangat penting. Bukan sekedar pemasokan modal dan teknologi saja. Tapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material agar pembangunan menjadi produktif.(Budiman, 2000:34). Sehingga pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat seperti prinsip demokrasi bisa terwujud.

Jadi dalam hal ini bisa dipastikan bahwa dinegara yang demokratis seperti Indonesia, kesejahteraan sangat mungkin untuk diwujudkan, apabila antara pertumbuhan pembangunan ekonomi diiringi dengan pertumbuhan pembangunan sosial dimana pemberdayaan rakyat sebagai basis utama. Kalaupun selama ini kesejahteraan belum terwujud, yang patut dipersalahkan bukanlah demokrasinya, tapi mungkin arah kebijakan yang perlu diperbaiki menuju pembangunan yang lebih pro-rakyat. Sehingga dengan demikian di Indonesia tercipta iklim pembangunan yang dinamis, menguntungkan pertumbuhan perekonomian negara dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional Indonesia dan tujuan dicanangkannya otonomi daerah di Indonesia sebagai negara yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2002. *Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Bolong, Bertolomeus. 2003. *Problem Pembangunan Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Yayasan Pancaran Kasih
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ketchum, Ricard, M. 2004. *Pengantar Demokrasi*. Yogyakarta: Niagara.
- Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides
- Lemhanas, 1997. *Pembangunan Nasionan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Depag RI
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sen, Amartya. 1999. *Development As Freedom*. Oxford: Oxford University Press
- Soeharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudja, Deding Ishaq. 2002. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Desa*. [www. pikiran rakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com). [27/12/2007].
- Wie, Kian Thee. 2004. *Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru*. Jakarta: Buku Kompas